



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKJIP

TAHUN 2024



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BLITAR**

Jl. Manukwari No.12 B Satreyan - Kanigoro



KATA PENGANTAR

Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata kepada kita semua, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

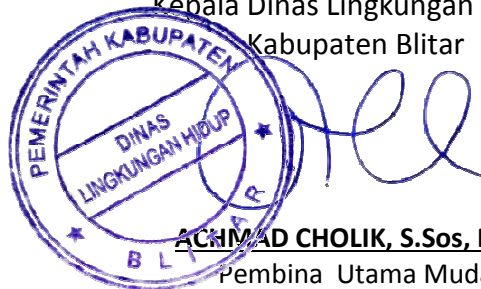
Penyusunan laporan ini telah diupayakan seoptimal mungkin agar dapat memberikan keterangan dan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar pada tahun 2024. Untuk itu kami berharap kiranya laporan ini dapat menjadi bahan masukan, pengkajian dan evaluasi serta pembinaan lebih lanjut untuk pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan ini. Akhirnya Kami berharap semoga Laporan ini nantinya dapat menunjang dalam segala kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, 19 Februari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Blitar



ACHMAD CHOLIK, S.Sos, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700725 199003 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	4
2.1 Perjanjian Kinerja	4
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	6
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	6
3.2. Realisasi Anggaran	31
BAB IV. PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran dan Tindak Lanjut.....	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Matrik Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 s/d 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar
- Lampiran 2** Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2024
- Lampiran 3** Ringkasan Realisasi Fisik dan Keuangan tahun 2024
- Lampiran 4** Foto Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar secara umum dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 104 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 104 Tahun 2022 pasal 2 disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang tata lingkungan, urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, urusan pemerintahan daerah di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan persampahan dan pertamanan serta tugas pembantuan. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan strategis pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian, konservasi, pemantauan dan pengawasan serta penataan lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
- e. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pembinaan dan pelaksanaan kerja sama bidang lingkungan hidup dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- h. penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, persampahan, limbah, pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas;



- j. pembinaan UPT;
- k. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Jumlah Penduduk di Kabupaten Blitar berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022 adalah sebanyak 1.240.322 jiwa. Adapun wilayah Kabupaten Blitar terbagi dua oleh sungai Brantas wilayah selatan sungai Brantas telah dikenal dengan sebutan Blitar selatan dengan luas \pm 698,94 km². Sedangkan Blitar utara memiliki luas \pm 898,94 km². Wilayah Kabupaten Blitar dengan kondisi geografis terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dengan adanya gunung Kelud yang aktif dan gunung Kawi di sebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada dibagian tengah. Dibagian selatan terbentang dari timur ke barat wilayah pesisir Kabupaten Blitar sepanjang 45 km menghadap samudra Indonesia. Selain itu, Kabupaten Blitar juga memiliki potensi unggulan di bidang peternakan, pertanian ataupun pertambangan, yang tentu saja potensi-potensi tersebut selain mendatangkan nilai ekonomis juga bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya alam di Kabupaten Blitar. Dengan kondisi Kabupaten Blitar seperti yang tersebut di atas, maka menimbulkan isu-isu strategis baik skala regional, nasional maupun internasional. Adapun isu-isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar antara lain :

- Banyaknya alih fungsi lahan
- Kerusakan hutan
- Anomali Iklim
- Pemanasan Global
- Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca
- Daerah rawan Tsunami
- Daerah rawan bencana gunung berapi
- Daerah rawan banjir
- Daerah rawan angin puting beliung
- Daerah rawan longsor



- Peningkatan pencemaran air, udara maupun tanah yang disebabkan oleh sampah atau oleh dunia usaha.

Yang mana apabila hal ini tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan masalah-masalah yang serius di Kabupaten Blitar.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA

Untuk mengatasi isu-isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang berkembang di Kabupaten Blitar, khususnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kekuatan anggaran yang dikelola sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2024, berusaha akan menjalankan program dan kegiatan untuk mengatasi isu-isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan dalam bab I. Untuk menjamin keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta dalam pengelolaan anggaran SKPD, maka dibuatlah Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen secara tertulis dari Kepala SKPD kepada Bupati yang berisikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola untuk dipertanggungjawabkan kepada Bupati sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 dibuat berdasarkan DPPA SKPD 2024 disesuaikan dengan IKU SKPD. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel. 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan	- Indeks Kualitas Air	55,4
		- Indeks Kualitas Udara	87,01
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,83
2.	Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan	- Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	82
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	80,4 (A)

Dari tabel Perjanjian Kinerja diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. IKU 1, IKU 2, IKU 3 diampu oleh 7 program yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
2. Untuk IKU 4 diampu oleh Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dan Program Pengelolaan Persampahan;
3. IKU 5 diampu oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas akan memberikan gambaran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi-misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Blitar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistimatis dan didasarkan pada kelompok indikator kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Berikut ini disajikan definisi operasional Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah gambaran kualitas Lingkungan Hidup pada suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH diformulasikan sebagai berikut : $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ Keterangan : IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 1. IKA : Indeks Kualitas Air 2. IKU : Indeks Kualitas Udara 3. IKL : Indeks Kualitas lahan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN
			Dengan Kriteria sebagai berikut : $90 \leq \text{IKLH} < 100$: Sangat Baik $70 \leq \text{IKLH} < 90$: Baik $50 \leq \text{IKLH} < 70$: Sedang $25 \leq \text{IKLH} < 50$: Buruk $0 \leq \text{IKLH} < 25$: Sangat Buruk
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA diformulasikan sebagai berikut : $= \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_A^2}{2}}$ Keterangan : 1. IPj : indeks pencemaran peruntukan j 2. Ci : konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) 3. Lij : baku mutu parameter i bagi peruntukan j 4. M : maksimum 5. A : Average (rata-rata) dengan ketentuan : $0 \leq \text{IPj} \leq 1,0$: baik (memenuhi baku mutu) $1,0 \leq \text{IPj} \leq 5,0$: cemar ringan $5,0 \leq \text{IPj} \leq 10,0$: cemar sedang $\text{IPj} > 10,0$: cemar berat Bobot indeks dengan batasan : a. Memenuhi baku mutu : 70 b. Cemar ringan : 50 c. Cemar sedang : 30 d. Cemar berat : 10 Nilai IKA merupakan hasil rerata dari IKA seluruh badan air pada wilayah administrasinya.
		Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKU diformulasikan sebagai berikut :



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN
			$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0.9} \times (Ieu - 0.1) \right)$ $Ieu = 50\% \text{Indeks } SO_2 + 50\% \text{Indeks } NO_2$ <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IKU : Indeks Kualitas Udara 2. Ieu : Rata-rata dari konsentrasi SO2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO2 Ref EU 3. Baku mutu udara ambien Ref EU untuk SO2 adalah 20 μ/m^3 dan NO2 adalah 40 μ/m^3 <p>Dengan Kriteria sebagai berikut :</p> <p>90 \leq IKLH < 100 : Sangat Baik 70 \leq IKLH < 90 : Baik 50 \leq IKLH < 70 : Sedang 25 \leq IKLH < 50 : Buruk 0 \leq IKLH < 25 : Sangat Buruk</p>
		Indeks Kualitas Lahan	<p>Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.</p> <p>IKL diformulasikan sebagai berikut :</p> $IKTL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ $DKK = \sum \text{Rumus } W \text{ di Tutupan Lahan} + \text{Rumus } W \text{ di Tutupan Belukar}$ <p>Rumus di Tutupan Hutan</p> <p>W kanal di Lindung :</p> $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{Luas\ FLEG}$ <p>W kanal di Budidaya :</p> $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Kanal}{Luas\ FBEG}$ <p>W terbakar di Lindung :</p> $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Bakar}{Luas\ FLEG}$ <p>W kanal di Lindung :</p> $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Bakar}{Luas\ FBEG}$ <p>Rumus di Belukar di Kawasan Hutan dan Fungsi Lindung</p> <p>W kanal di Lindung :</p>



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN
			$0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLG_Kanal+BL_FLG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ <p>W kanal di Budidaya :</p> $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{(BH_FBG_Kanal+BL_FBG_Kanal) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ <p>W terbakar di Lindung :</p> $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLB_Bakar+BL_FLG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ <p>W terbakar di Budidaya :</p> $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{(BH_FLB_Bakar+BL_FLG_Bakar) \times 0,6}{Luas\ FLEG}$ <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2. DKK : Dampak Kebakaran dan Kanal <p>Dengan Kriteria sebagai berikut :</p> <p>90 ≤ IKLH < 100 : Sangat Baik 70 ≤ IKLH < 90 : Baik 50 ≤ IKLH < 70 : Sedang 25 ≤ IKLH < 50 : Buruk 0 ≤ IKLH < 25 : Sangat Buruk</p>
3	Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	<p>Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan (IKPS) adalah nilai yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.</p> <p>IKPS diformulasikan sebagai berikut :</p> $IKPS = \sum \text{Nilai Indikator Kebijakan} + \sum \text{Nilai Sumber Daya Manusia dan Sarpras} + \sum \text{Nilai Sosialisasi dan Implementasi} + \sum \text{Nilai Capaian Target dan Kapasitas} + \sum \text{Efisiensi Anggaran} + \sum \text{Nilai Kota Bersih} + \sum \text{Nilai Indeks Kualitas Air}$ <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IKPS : Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	<p>Nilai SAKIP adalah Ukuran yang dihasilkan dari rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja</p>



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN
			<p>instansi pemerintah.</p> $\text{Nilai SAKIP} = \sum \text{Nilai Perencanaan} + \text{Nilai Pengukuran Kinerja} + \text{Nilai Pelaporan Kinerja} + \text{Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal}$ <p>Dengan Kriteria sebagai berikut :</p> <p>AA : Sangat Memuaskan A : Memuaskan BB : Sangat Baik B : Baik CC : Cukup / Memadasi C : Kurang D : Sangat Kurang</p>

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati/Wakil Bupati.

Pengukuran Capaian Kinerja pada tahun 2024 dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi kinerja, anggaran dan efisiensi yang telah dilakukan sampai dengan tahun bersangkutan;
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan realiasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional;
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk memperjelas capaian kinerja organisasi pada tahun 2024 kami sajikan pada tabel-tabel dibawah ini :



Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan	- Indeks Kualitas Air	55,4	53,4	96,39
		- Indeks Kualitas Udara	87,01	88,06	101,21
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,83	40,61	84,90
2.	Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan	- Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	82	52,62	64,17
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	80,4 (A)	70,90 (BB)	88,18

Dari tabel diatas dapat disajikan analisa sebagai berikut :

1. 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur IKLH;
2. Dari data capaian kinerja indikator kinerja utama (IKU) pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :
 - a. 2 (dua) IKU yang merupakan komposit dari IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) memperoleh capaian kinerja dibawah dari target yang telah ditentukan. Indeks Kualitas Air dari target 55,4 tercapai 53,4 atau sekitar 96,39% sehingga terdapat selisih antara target kinerja dengan capaian kinerja sebesar 3,61% dan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan dari target 47,83 hanya tercapai 40,61, atau sekitar



84,9%, sehingga terdapat selisih antara target kinerja dengan capaian kinerja sebesar 15,1%.

- b. 1 (satu) IKU yang merupakan salah satu parameter dari IKLH yaitu Indeks Kualitas Udara capaian kerjanya melampaui dari target yang telah ditentukan. Untuk Indeks Kualitas Udara dari target 87,01 tercapai 88,06 atau sekitar 101,21%.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Untuk Indeks Pengelolaan Persampahan dari target 82 tercapai 52,62 atau sekitar 64,17%.
4. Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan, dari target 80,4 (A) tercapai 70,90 (BB) atau 88,18% sehingga terdapat selisih antara target kinerja dan capain kinerja sebesar 11,82%.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	55,1	55	55,2	60,53	55,3	59,41	55,4	53,4
	Indeks Kualitas Udara	86,7	87,46	86,8	87,63	86,91	82,07	87,01	88,06
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	41,41	43,04	43,55	39,08	45,69	39,70	47,83	40,61
Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	79	77,21	80	80,27	81	84,97	82	52,62
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	A	A	80,2 (A)	81,55 (A)	83,41 (A)	83,41 (A)	80,4 (A)	70,90 (BB)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :



1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Air pada tahun 2024 mengalami penurunan nilai dibandingkan dengan capaian tahun 2023, yaitu pada angka 59,41 turun menjadi 53,4 di tahun 2024 atau turun sebanyak 6,01 poin. Meskipun angka capaian turun, namun kategori Indeks Kualitas Air tahun 2024 masih berada pada kategori yang sama dengan tahun 2023 yaitu kategori sedang.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Udara pada tahun 2024 mengalami peningkatan nilai dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Pada tahun 2023 capaian Indeks Kualitas Udara dia angka 82,07, pada tahun 2024 naik menjadi 86,91 atau naik sebanyak 4,84 poin. Capain Indeks Kualitas Udara di tahun 2024 masih pada kategori baik. Pada tahun 2024 lokasi pengujian kualitas udara di Kabupaten Blitar dilakukan di empat lokasi yaitu di pemukiman, perkantoran, transportasi, dan industri, dimana di dua lokasi yaitu transportasi dan industri merupakan pusat kegiatan yang menghasilkan emisi yang berpotensi mencemari udara. Nilai Indeks Kualitas Udara masih termasuk dalam katagori baik yang menunjukkan bahwa kualitas udara di Kabupaten Blitar kondisinya masih baik dan aman dari polusi;
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Pada Tahun 2024 capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) berada diangka 40,61 dibanding capaian tahun 2024 di angka 39,70 atau naik sebanyak 0,91 poin. Pada tahun 2024 capain kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih berada pada kategori kurang. Hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), selain itu luasnya lahan kritis yang disebabkan oleh kekeringan akibat musim kemarau, dampak pemanasan global dan alih fungsi lahan sehingga luas tutupan lahan untuk tahun 2024 tidak mengalami perkembangan yang signifikan;
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan, pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Capain kinerja pada tahun 2024 sebesar 52,62 atau menurun sebanyak 32,35 poin dibandingkan tahun 2023. Penurunan capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan dikarenakan capaian pengurangan sampah mengalami



penurunan yang signifikan karena adanya perubahan data SIPSN tahun 2023 hasil dari verifikasi dan validasi data persampahan oleh Provinsi dan KLHK.

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, pada tahun ini capaian Nilai SAKIP 70,90 menurun dibanding capaian tahun 2023 di angka 83,41 atau menurun sebanyak 12,51 poin dan berada dalam predikat BB (Sangat Baik).

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	55,60	53,4	96,04%
	Indeks Kualitas Udara	87,21	88,06	100,97%
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,11	40,61	77,93%
Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	84	52,62	62,64%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	80,6 (A)	70,90 (BB)	87,97%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada masing-masing indicator kinerja utama (IKU) bila dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD/Renstra dapat diuraikan sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Air sampai dengan tahun keempat RPJMD periode 2021-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 96,04%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja kualitas air di



- Kabupaten Blitar belum mencapai target akhir RPJMD dan berada pada kategori sedang. Pencapaian kinerja ini perlu ditingkatkan lagi agar kualitas air di Kabupaten Blitar bisa berada pada kategori baik;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Udara sampai dengan tahun keempat RPJMD periode 2021-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 100,97%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja kualitas udara di Kabupaten Blitar sudah melampaui target akhir RPJMD. Meskipun capaian pada tahun ini termasuk pada kategori baik, namun harus ditingkatkan kembali kualitas udara di Kabupaten Blitar agar bisa berada pada kategori sangat baik pada akhir periode RPJMD / Renstra;
 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Tutupan Lahan sampai dengan keempat RPJMD periode 2021-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 77,93%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja kualitas tutupan lahan di Kabupaten Blitar masih jauh dari target akhir RPJMD. Langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan seperti rehabilitasi lahan dan program pelestarian hutan dan lahan berkelanjutan dengan kerja sama lintas sektoral perlu dilakukan dengan harapan pencapaian target kinerja kualitas tutupan lahan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD.
 4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan sampai dengan tahun keempat RPJMD periode 2021-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 62,64%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pengelolaan persampahan belum mencapai target akhir RPJMD. Pengelolaan sampah harus ditingkatkan seiring dengan target Pemerintah Pusat tahun 2025 pengelolaan sampah di seluruh daerah mencapai 100% . Untuk mencapai target ini tentunya memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat, karena pengelolaan persampahan merupakan tanggung jawab dari semua pihak.
 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah sampai dengan tahun keempat RPJMD periode 2021-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 87,97%. Meskipun Nilai SAKIP belum mencapai target akhir RPJMD / Renstra, namun predikat SAKIP Perangkat Daerah berada pada kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja pemerintah berjalan cukup baik. Untuk meningkatkan Nilai dan Predikat



SAKIP Perangkat Daerah diperlukan penguatan komitmen organisasi, penerapan anggaran berbasis kinerja yang efisien dan kerja sama yang baik oleh berbagai pihak.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI PROVINSI JATIM	REALISASI NASIONAL	REALISASI KAB. BLITAR
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	54,75	54,76	53,4
	Indeks Kualitas Udara	88,09	90,17	88,06
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,30	62,25	40,61
Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	-	-	52,62
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	-	-	70,90 (BB)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU) bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capain Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas air Kabupaten Blitar masih di bawah capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, namun kualitas air di Kabupaten Blitar berada pada kategori yang sama dengan Provinsi Jawa Timur maupun nasional yaitu “sedang”;
2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Udara Kabupaten Blitar di bawah capaian Indeks Kualitas Udara Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Namun, kualitas udara di Kabupaten Blitar masih berada dalam kategori yang sama dengan capain Provinsi Jawa Timur yaitu ”baik”, sedangkan capaian nasional pada kategori “sangat baik”;



3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Blitar masih di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Blitar berada pada kategori “kurang” sama dengan kategori capaian Provinsi Jawa Timur. Sedangkan capaian Nasional yang berada pada kategori “sedang”,
4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional karena menggunakan indikator yang berbeda.

Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN OPD
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	12.123.953.658	49,02
		Indeks Kualitas Udara		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
2	Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.570.991.985	14,44
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	9.037.044.487	36,54
TOTAL			24.731.990.160	100

Dari tabel di atas dapat dijelaskan/diuraikan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar mempunyai 3 sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan, Meningkatkan Pengelolaan Kebersihan , dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan” menggunakan 3 indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan/vegetasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar 49,02% dari pagu OPD;



3. Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan” menggunakan indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 14,44% dari pagu OPD;
4. Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” menggunakan indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar 36,54% dari pagu OPD

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran pada tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja utama yang dijabarkan dengan program/kegiatan disajikan berdasarkan tabel berikut :



Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	80,4 (A)	70,90 (BB)	88,18%	9.037.044.487	8.741.370.752	96,73%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	9.037.044.487	8.741.370.752	96,73%
Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	55,4	53,4	96,39%	12.991.506.588	7.366.074.702,35	56,70%
	Indeks Kualitas Udara	87,01	88,06	101,21%			
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,83	40,61	84,90%			
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	5%	5%	100%	300.00.000	299.999.995	100,00%
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup	10%	10%	100%	9.881.966.273	4.402.003.425	44,55%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan	0,05%	0,05%	0100%	867.552.900	784.354.079	90,41%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	2%	2%	100%	24.000.000	23.999.960	100,00%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH	75%	71,57%	95,43%	78.430.615	76.592.345	97,66%



Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
	dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab						
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan	10%	10%	100%	1.801.627.868	1.741.813.880	96,68%
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	5%	1%	20%	12.678.932	12.637.018	99,67%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	65%	100%	153,85%	25.250.000	24.674.000	97,72%
Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	82	52,62	64,17%	2.703.439.085	2.677.052.418	99,02%
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola	82%	58,50	71,34%	2.703.439.085	2.677.052.418	99,02%
Total					24.731.990.160	18.784.497.872,35	75,95%



Dari tabel diatas dapat disajikan analisa sebagai berikut :

1. Untuk indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kualitas air, Indeks kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan diampu oleh 8 program yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dimana ketiga program tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.123.953.658,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.581.720.623,35 atau 54,28%;
2. Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan diampu oleh Program Pengelolaan Keanekaagaman Hayati (KEHATI) dan Program Pengelolaan Persampahan dimana program tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.570.991.985,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 3.461.052.418,- atau 96,92%;;
3. Untuk indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah diampu oleh 1 program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana program tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.037.044.487,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.741.370.752,- atau 96,73%;
4. Secara keseluruhan capaian realisasi anggaran pembangunan tahun 2024 sebesar Rp 18.784.497.872,35 (75,95%) dari target Rp 24.731.990.160,-;

Tabel 3.7
Analisa Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan	- Indeks Kualitas Air	55,4	53,4	96,39
		- Indeks Kualitas Udara	87,01	88,06	101,21
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,83	40,61	84,90
2.	Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan	- Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	82	52,62	64,17
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	80,4 (A)	70,90 (BB)	88,18

Dari data tabel di atas dapat diuraikan/dianalisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Capaian Indeks Kualitas Air tidak mencapai target yang telah ditentukan .Beberapa hal yang mempengaruhi nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di Wilayah Kabupaten Blitar dan verifikasi serta perhitungan yang dilakukan oleh KLHK pada tahun 2024 diketahui bahwa nilai IKA Kabupaten Blitar tahun 2024 adalah sebesar 53,40. Nilai tersebut masuk dalam kategori sedang. Nilai IKA pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni dari 59,41 pada tahun 2023 menjadi 53,40 pada tahun 2024. Nilai tersebut belum memenuhi target capaian nilai IKA tahun 2024, dengan persentase capaian target sebesar 96,39%.
 - b. Capaian IKA Kabupaten Blitar periode 2022 – 2024 mengalami penurunan nilai indeks kualitas air kabuapten Blitar setiap tahunnya. Penurunan nilai indeks



kualitas air ini mengindikasikan bahwa kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Blitar kian lama kian memburuk. Pemantauan terhadap kualitas air sungai pada tahun 2024 dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini KLHK, Provinsi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah dalam hal ini DLH Kabupaten Blitar. Pemerintah Pusat dan Provinsi melakukan pemantauan pada wilayah Sungai Brantas dengan jumlah total titik pantau sebanyak 8 (delapan) titik pantau, sedangkan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pada 5 (lima) sungai terdiri dari bagian hulu, tengah, dan hilir, serta 1 (satu) danau.

- c. Berdasarkan hasil pemantauan secara periodik, terdapat 53 sampel kualitas air yang terverifikasi dan menjadi sumber data perhitungan IKA Kabupaten Blitar. Hasil uji Kualitas air menunjukkan bahwa parameter yang melebihi baku mutu didominasi oleh parameter fecal coli, disusul oleh parameter fosfat, BOD, dan COD. Berdasarkan hasil uji pada 53 sampel uji kualitas air di Kabupaten Blitar, terdapat 29 sampel air dengan parameter fecal coli melebihi baku mutu air kelas II. Lima Belas (15) sampel melebihi baku mutu Parameter fosfat. Terdapat 8 (delapan) sampel air yang melebihi baku mutu untuk parameter BOD. Dan 3 (tiga) sampel melebihi baku mutu parameter COD.
- d. Berdasarkan hasil uji Laboratorium terhadap kualitas air tersebut dapat dianalisa bahwa kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Blitar banyak dipengaruhi oleh limbah organik dan dari aktivitas domestik. Hal ini terlihat dari dominasi parameter fecal coli yang melebihi baku mutu pada sampel uji kualitas air. Dari 53 Sampel, terdapat 29 Sampel yang melebihi baku mutu parameter fecal coli. Parameter fecal coliform (E.Coli) sebagai indikator kontaminasi tinja dari manusia dan/atau hewan. Penentuan fecal coliform menjadi indikator pencemaran dikarenakan jumlah koloninya berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen.
- e. Keberadaan Parameter fecal coli yang melebihi baku mutu pada sampel kualitas air sungai di Kabupaten Blitar kemungkinan banyak dipengaruhi oleh aktivitas peternakan yang berada di wilayah Kabupaten Blitar. Berdasarkan data BPS tahun 2023 terdapat 142.068 ekor populasi ternak sapi potong, 20.984 ekor populasi sapi perah, dan 167.096 ekor populasi kambing di Kabupaten Blitar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekali peternak baik itu



peternak sapi ataupun kambing yang membuang limbah berupa kotoran hewan langsung ke badan air tanpa adanya pengolahan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Blitar untuk meminimalisir terjadinya pencemaran sungai yang disebabkan oleh aktivitas peternakan. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah antara lain dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur pengolahan limbah (IPAL) komunal limbah ternak khususnya bagi peternakan rakyat, selain itu edukasi peternak ramah lingkungan juga penting dilakukan untuk menanamkan kebiasaan dan perilaku peduli lingkungan.

- f. Hasil analisa juga menunjukkan bahwa parameter fosfat menjadi salah satu faktor yang juga sangat berpengaruh pada kondisi kualitas air sungai di wilayah Kabupaten Blitar. Hal ini terlihat dari 53 (lima puluh tiga) sampel uji terdapat 15 (lima belas) sampel yang melebihi baku mutu untuk parameter fosfat. Keberadaan kandungan fosfat di perairan dipengaruhi oleh aktivitas pertanian dan domestik. Salah satu faktor yang menyebabkan kadar fosfat tinggi di perairan adalah karena adanya limbah domestik yang pada umumnya mengandung detergen. Detergen dapat meningkatkan kadar fosfat karena ion fosfat merupakan salah satu komposisi penyusun detergen. Parameter fosfat yang berlebihan pada badan air dapat menyebabkan kondisi eutrofik. Kondisi eutrofik pada perairan dapat memicu terjadinya blooming algae (ledakan populasi fitoplankton).
- g. Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa permasalahan kualitas air sungai di Wilayah Kabupaten Blitar banyak dipengaruhi oleh kegiatan/aktivitas masyarakat pada sektor pertanian, peternakan, dan domestik di sepanjang aliran sungai, baik pada bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Hasil perhitungan IKA menunjukkan bahwa dari 53 sampel uji kualitas air, 24 (dua puluh empat) sampel masuk dalam kategori tercemar ringan, 19 (sembilan belas) sampel masuk dalam kriteria memenuhi, dan 10 (sepuluh) sampel kategori tercemar sedang. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa kondisi kualitas perairan di Kabupaten Blitar pada umumnya dalam kondisi tercemar ringan, sehingga upaya perbaikan kualitas air sungai sangat diperlukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA) dan menjaga keberlanjutan fungsi sungai dalam ekosistem dan untuk mendukung kebutuhan kehidupan manusia akan air bersih.



- b) Capaian Indeks Kualitas Udara mencapai target yang telah ditentukan. Berikut analisa terkait capain Indeks Kualitas Udara :
- a. Capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Blitar pada tahun 2024 adalah sebesar 88,06. Nilai tersebut telah memenuhi target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Blitar pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 82,07 di tahun 2023 menjadi 88,06 di tahun 2024. Capaian nilai IKU tersebut masuk dalam kategori baik.
 - b. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2024 diperoleh berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien di wilayah Kabupaten Blitar pada tahun 2024. Pengambilan sampel kualitas udara ambien dilakukan pada titik-titik pemantauan yang mewakili kriteria Pemukiman, Perkantoran, Industri dan Transportasi. Pengambilan sampel kualitas udara ambien menggunakan metode passive sampler dengan parameter yang dipantau yaitu Parameter SO₂ dan NO₂. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara pada tahun 2024 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
 - c. Pemantauan Kualitas Udara oleh Pemerintah Pusat tahap I dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2024 dan Tahap II pada Bulan September 2024. Berdasarkan hasil pemantauan tahap I dan tahap II yang dilakukan oleh Pusat diketahui bahwa konsentrasi NO₂ dan SO₂ paling tinggi berada pada titik pantau Kriteria Industri yang berada di Desa Rejoso, Kec. Binangun, disusul oleh kriteria kawasan transportasi dengan titik pantau berada di Pasar Garum, Jalan Raya Garum, Kec. Garum. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terjadi trend penurunan konsentrasi SO₂ dan NO₂ dari pemantauan tahap I ke tahap II. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara pada periode pemantauan tahap II (Juli – Desember) tahun 2024 relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas udara pada periode pemantauan tahap I (Januari – Juni) tahun 2024.
 - d. Pemantauan Kualitas Udara Ambien oleh Provinsi Jawa Timur tahap I dilaksanakan pada bulan Maret dan tahap II dilaksanakan pada Bulan Agustus tahun 2024. Pada pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur di wilayah Kabupaten Blitar terdapat anomali data yang disebabkan oleh



tidak adanya data pemantauan tahap I pada titik pemantauan kawasan perkantoran dikarenakan adanya kesalahan pada saat pengambilan sampel (sampel hilang). Pada pemantauan tahap II Konsentrasi SO₂ dan NO₂ pada keempat titik pantau relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemantauan pada tahap I (Periode Januari – Juni). Hasil Pemantauan menunjukkan Konsentrasi NO₂ tertinggi pada pemantauan tahap II titik pantau kawasan transportasi yang berada di Kantor Kecamatan Ponggok, dengan konsentrasi NO₂ sebesar 6,87 µg/m³. Konsentrasi SO₂ tertinggi pada pemantauan tahap II titik pantau kawasan perkantoran dengan nilai konsentrasi SO₂ sebesar 8,85 µg/m³

- e. Pemantauan Kualitas Udara Ambien oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahap I dilaksanakan pada bulan Maret dan Tahap II dilaksanakan pada Bulan September tahun 2024. Berdasarkan Hasil pemantauan diketahui bahwa pada pemantauan tahap II konsentrasi SO₂ dan NO₂ lebih rendah dari pemantauan pada tahap I. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas udara di wilayah Kabupaten Blitar, khususnya pada titik-titik yang dipantau.
- f. Hasil Pemantauan dari 12 titik pemantauan kualitas udara ambien kemudian dihitung rerata kandungan per parameter dan Indeks per parameter yang diolah melalui website IKLH. Rata-rata konsentrasi NO₂ adalah sebesar 8,42 µg/m³ dan rata-rata konsentrasi SO₂ adalah sebesar 8,39 µg/m³. Nilai tersebut masih berada dibawah baku mutu referensi yaitu 40,00 µg/m³ untuk NO₂ dan 20,00 µg/m³ untuk SO₂. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Blitar masih cukup baik. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Blitar Tahun 2024 yaitu sebesar 88,06 yang masuk dalam kategori baik.
- g. Terjadi peningkatan Capaian IKU Kabupaten Blitar dari 82,07 pada tahun 2023 menjadi 88,06 pada tahun 2024. Evaluasi tahun 2023 menunjukkan indeks kualitas udara berada di bawah target dengan status kualitas udara masih dalam kategori “baik” dengan nilai IKU sebesar 82,07. Pada tahun 2024 memperlihatkan peningkatan nilai IKU yang naik sebesar 5,66 poin sehingga capaian IKU berada pada angka 88,06. Meskipun terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2024, hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai tersebut masuk dalam kategori “baik” sama seperti tahun sebelumnya.



- h. Beberapa hal yang mengakomodasi kenaikan indeks kualitas udara pada tahun 2024 diantaranya adalah keberhasilan program-program dan upaya pengendalian pencemaran udara yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu melaksanakan program pemantauan kualitas udara yang dilaksanakan secara berkala pada titik-titik pemantauan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Selain itu juga dilaksanakan program penanaman tanaman-tanaman peneduh jalan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara yang berasal dari emisi kendaraan bermotor. Berdasarkan evaluasi tahun 2024, penambahan titik pantau pada pelaksanaan pemantauan kualitas udara oleh Provinsi Jawa Timur juga menjadi salah satu faktor naiknya indeks kualitas udara tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak titik pengambilan sampel maka semakin banyak pula jumlah data pemantauan yang terhimpun sehingga informasi terhadap kualitas udara di wilayah kabupaten blitar semakin representativ.
- c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan tidak mencapai target yang telah ditentukan, dari target 47,83 tercapai 40,61 atau 84,90%. Namun, tahun 2024 capain Indeks Kualitas Tutupan Lahan mengalami kenaikan sebesar 0,91 poin dibandingkan tahun 2023 dan berada pada kategori “Kurang”. Beberapa faktor yang memengaruhi capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan antara lain :
- a. Tidak adanya alokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Blitar.
 - b. Dampak pemanasan global menyebabkan anomali musim yang berpengaruh terhadap hidup/mati pohon
 - c. Alih fungsi lahan.
 - d. Titik lokasi tutupan hutan, lahan, belukar, RTH, maupun area rehabilitasi yang diinput untuk perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan belum semuanya terdeteksi oleh citra satelit.
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan tidak mencapai target yang ditetapkan, dari target 82 tercapai 52,62 atau 64,17% . Faktor penyebab tidak tercapainya indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan antara lain :
- 1) Kurangnya infrastruktur dan sarpras persampahan
 - 2) Belum meratanya sebaran bank sampah di wilayah Kabupaten Blitar



- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga
 - 4) Luasnya wilayah Kabupaten Blitar yang menyebabkan penanganan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi kurang optimal.
 - 5) Umur TPA yang semakin berkurang.
 - 6) Adanya revisi pengisian data persampahan pada SIPSN hasil dari validasi dan verifikasi oleh KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sehingga terjadi perubahan data awal untuk penetapan target kinerja persampahan.
- e) Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah tidak mencapai target yang ditetapkan, dari target nilai SAKIP 80,4 (predikat A), tercapai nilai 70,90 (predikat BB). Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah antara lain :
- a. Rencana aksi belum disusun secara rinci yang memuat target kinerja dan anggaran serta penanggung jawab
 - b. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi
 - c. Laporan Kinerja Triwulan I belum disusun dan disampaikan kepada Bupati
 - d. Sistematisa penyusunan LKjIP belum sesuai dengan Perbup Nomor 54 Tahun 2021
 - e. Dokumen LKjIP belum menginformasikan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
 - f. Evaluasi AKuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi.

Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blitar tetap lestari dan tidak tercemar antara lain :

1. Pengawasan kepada penanggung jawab usaha / kegiatan khususnya peternakan serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola limbah / sampah rumah tangga.
2. Penanaman pohon untuk rehabilitasi serta pengusulan untuk penambahan Ruang Terbuka Hijau Publik.
3. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan dalam hal pengelolaan dan pemantaun lingkungan hidup sebagai



upaya perlindungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh pelaku usaha/kegiatan.

4. Pengusulan untuk pembangunan infrastruktur persampahan serta penambahan sarpras persampahan
5. Mensosialisasikan program Satu Desa Satu Bank Sampah.
6. Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga.

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	96,39	54,28	1,7
		Indeks Kualitas Udara	101,21		
		Indeks Kualitas Lahan	84,90		
2	Meningkatnya Pengelolaan Kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Kebersihan	52,64	96,92	0,5
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	70,90	96,73	0,7
Rata - Rata			81,21	75,95	1,1

Dari Tabel diatas dapat dikemukakan analisa sebagai berikut :

1. Pada tahun 2024 ada 3 sasaran strategis serta 5 indikator kinerja utama (IKU) yang ditentukan. Dari lima indikator tersebut Dinas Lingkungan Hidup, satu IKU berhasil mencapai target kinerja yang ditentukan dan ada empat IKU yang belum mencapai target. Tercapainya target kinerja tentunya didukung oleh tersedianya anggaran. Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup mampu melakukan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengabaikan pencapaian target kinerja. Secara keseluruhan rata-rata capain kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran sudah efisien.
2. Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan yang diampu oleh Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaagaman



Hayati (KEHATI), Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar Rp. 5.625.431.885,65,- yang mana jumlah tersebut diperoleh dari efisiensi pengadaan barang dan jasa, adanya peran serta dari pihak-pihak lain dalam berpartisipasi aktif dalam gerakan peduli lingkungan baik event bersih-bersih sungai maupun penanaman dalam rangka untuk mendukung gerakan blitar menanam serta donasi pohon serta efisiensi dari anggaran untuk biaya ganti investasi tegakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 yang tidak dapat direalisasikan karena Perhutani tidak berani memberikan tagihan untuk ganti rugi tegakan sehingga Pemkab hanya melakukan proses pebangan dan pengangkutan sedangkan aset tegakan diserahkan ke Perhutani. Pada sasaran ini rasio antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran telah efisien;

3. Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Pertamanan yang diampu oleh Program Pengelolaan Persampahan berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar Rp. 26.386.667,- yang mana jumlah tersebut diperoleh dari efisiensi dari pengadaan barang dan jasa. Namun, rasio antara kinerja dengan realisasi anggaran belum efisien.
4. Pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang diampu oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar Rp. 295.673.735,- yang mana jumlah tersebut diperoleh dari efisiensi dari pengadaan barang dan jasa terutama untuk belanja cetak dan penggandaan. Namun, rasio antara kinerja dengan realisasi anggaran belum efisien.

Adapun pencapaian target IKU dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 64,64
- Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Air 53,4
- Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Udara 88,06
- Pencapaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan 40,61

- Pencapaian Kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan 52,62
- Pencapaian Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah 70,90 (BB)

IKLH merupakan salah satu indikator di RPJMD dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai Dinas pengampu untuk indikator IKLH. Target IKLH untuk tahun 2024 adalah 66,54 dan capaian kinerja sebesar 64,64 atau 97,14%.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebesar 64,64. Dengan nilai IKLH pada kisaran $50 \leq \text{IKLH} < 70$, maka kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blitar masuk kategori sedang. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Tabel 3.9
Skala Nilai Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)

No	Kriteria	Skor
1	Sangat Baik	$\text{IKLH} \geq 90$
2	Baik	$70 \leq \text{IKLH} < 90$
3	Sedang	$50 \leq \text{IKLH} < 70$
4	Buruk	$25 \leq \text{IKLH} < 50$
5	Sangat Buruk	$\text{IKLH} < 25$

3.2. REALISASI ANGGARAN

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar mempunyai 10 program, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);



7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Untuk melaksanakan program-program tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar mendapat pagu anggaran sebesar **Rp. 24.731.990.160,00**. Realisasi Anggaran pada Program – program tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar **Rp. 18.784.497.872,35** Atau 75,95% dari pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, dengan demikian jumlah anggaran Program/kegiatan yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 5.947.492.284,65,- atau 24,05% yang dirinci dalam program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Program dan Kegiatan Beserta Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.037.044.487	8.741.370.752	96,73
<i>I.</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>4.146.294</i>	<i>1.510.180</i>	<i>36,42</i>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.914.084	689.720	36,03
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.232.210	820.460	36,76
<i>II.</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>4.060.020.958</i>	<i>3.844.723.178</i>	<i>94,70</i>
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.033.526.400	3.821.265.838	84,74
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.720.000	21.720.000	100,00
5.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.774.558	1.737.340	36,96
<i>III</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>120.000.000</i>	<i>119.750.000</i>	<i>99,79</i>
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000	119.750.000	99,79
<i>IV.</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>390.942.988</i>	<i>390.069.648</i>	<i>99,78</i>
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.155.953	2.153.430	99,88
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.801.944	68.798.216	99,99
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.560.514	36.559.900	100,00



NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.360.000	90,67
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.924.577	281.198.102	99,74
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.479.396	7.400.000	98,94
12.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.479.396	7.400.000	98,94
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.047.353.092	3.034.267.122	99,57
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.663.125	16.660.000	99,98
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.655.282	106.902.016	89,34
15.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.476.795	12.156.381	97,43
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.898.557.890	2.898.548.725	100,00
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.407.101.759	1.343.650.624	95,49
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.407.101.759	1.343.650.624	95,49
B.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	300.000.000	299.999.995	100,00
VIII.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	300.000.000	299.999.995	100,00
18.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	300.000.000	299.999.995	100,00
C.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.881.966.273	4.402.003.425	44,55
IX.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	174.173.408	170.887.351	98,11
19.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	95.000.000	93.473.260	98,39
20.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	16.099.941	14.877.406	92,41
21.	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	63.073.467	62.536.658	99,15
X.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	70.325.115	70.097.115	99,68
22.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	70.325.115	70.097.115	99,68
XI.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	9.637.467.750	4.161.018.959	43,18
23.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	788.353.380	775.677.453	98,39
24.	Pelaksanaan Rehabilitasi	8.849.114.370	3.385.341.506	38,26
D.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	867.552.900	784.354.079	90,41
XII.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	867.552.900	784.354.079	90,41
25.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	867.552.900	784.354.079	90,41



NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
E	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	24.000.000	23.999.960	100,00
XIII	Penyimpanan sementara Limbah B3	24.000.000	23.999.960	100,00
26	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	24.000.000	23.999.960	100,00
F.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	78.430.615	76.592.345	97,66
XIV.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78.430.615	76.592.345	97,66
27.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	17.000.000	16.986.064	99,92
28.	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	61.430.000	59.606.281	97,03
G.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.801.627.868	1.741.813.880	96,68
XI.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.801.627.868	1.741.813.880	96,68
29.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	787.972.170	767.444.930	97,39
30	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	462.022.228	457.741.800	99,07
31.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	551.633.470	516.627.150	93,65
H.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	12.678.932	12.637.018	99,67
XVI.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.678.932	12.637.018	99,67
32.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	12.678.932	12.637.018	99,67
I.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.250.000	24.674.000	97,72
XVII.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	25.250.000	24.674.000	97,72
33.	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	25.250.000	24.674.000	97,72
J.	Program Pengelolaan Persampahan	2.703.439.085	2.677.052.418	99,02
XVIII.	Pengelolaan Sampah	2.703.439.085	2.677.052.418	99,02
34.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	300.000.000	299.933.658	99,98
35.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.188.257.545	2.164.569.706	98,92
36.	Penanganan sampah melalui pengangkutan	16.117.096	16.054.500	99,61
37.	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	64.571.764	63.405.064	98,19



NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
38.	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	59.001.755	58.598.990	99,32
39.	Pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	75.490.925	74.490.500	98,67
	JUMLAH	24.731.990.160	18.784.497.872,35	75,95

Dari tabel diatas dapat dianalisa sebagai berikut :

- Bahwa secara keseluruhan realisasi kinerja anggaran pada program/kegiatan tercapai 75,95% .

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan anggaran (PAK), sehingga pelaksanaan progres capaian kinerja kegiatan kurang maksimal karena keterbatasan waktu penyelesaian yang hanya kurang dari 2 (dua) bulan;
2. Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi, realisasi anggarannya juga sangat rendah yaitu dari anggaran Rp. 8.849.114.370,- hanya terserap sebesar Rp. 3.385.341.506 atau sekitar 38,26%. Rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan alokasi anggaran untuk biaya ganti investasi tegakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 tidak dapat direalisasikan karena mengacu PermenLKH Nomor 7 Tahun 2021 dan PermenLKH Nomor tahun 2021 sehingga Perhutani tidak berani memberikan tagihan untuk ganti rugi tegakan sehingga Pemkab hanya melakukan proses pebangan dan pengangkutan sedangkan aset tegakan diserahkan ke Perhutani. Selain itu pada tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi kewajiban daerah pasca terbitnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Jalan Lintas Selatan (Pansela) antara lain: fasilitasi tata batas, fasilitasi inventarisasi hutan, fasilitasi teknis untuk tebangan, serta fasilitasi penilaian keberhasilan tanaman Tahura sebagai kewajiban atas IPPKH Pansela. Dari hasil evaluasi bahwa keberhasilan tanaman Tahura belum sesuai dengan dokumen rencana teknis (rencana pelaksanaan penanaman Rehab DAS yang meliputi luasan, jarak tanam, dan jenis) yang disusun sehingga ke depan masih diperlukan evaluasi rencana teknis.



3. Masalah Persampahan yang meliputi :
 - a. Semakin besar volume sampah yang dihasilkan baik skala rumah tangga maupun industri;
 - b. Kurangnya sarana prasarana persampahan seperti kendaraan pengangkut sampah serta kontainer;
 - c. Jumlah tenaga kebersihan yang belum memadai;
 - d. TPA belum mampu untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan.
4. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang belum baik, seperti :
 - a. Perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya
 - b. Tidak memilah sampah organik dan anorganik
5. Masih ada usaha / kegiatan yang menghasilkan limbah namun belum diikuti dengan kepatuhan dalam pengelolaannya;
6. Kegiatan pengawasan dan pengaduan dugaan pencemaran, terkendala oleh hasil uji laboratorium yang telah terakreditasi yang memakan waktu cukup lama untuk membuktikan apakah ada pencemaran atau tidak ada pencemaran;
7. Belum ada peraturan daerah yang mengatur sebagai dasar untuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.



BAB IV PENUTUP

Pencapaian Kinerja baik sasaran strategis maupun program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024 secara umum semuanya dalam kategori cukup baik, namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan, masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi guna meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Dari aspek keuangan (anggaran program/kegiatan/sub kegiatan) tidak semuanya terserap 100%, rata-rata serapan dari 38 sub kegiatan adalah 75,95%, hal ini bisa diartikan bahwa ada efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, dan ada juga belanja kegiatan (belanja pegawai/barang dan jasa/modal) yang tidak bisa dilaksanakan karena terkendala oleh faktor-faktor teknis.

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari aspek pelaksanaan kegiatan, kinerja yang dicapai sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kinerja pencapaian sasaran yang telah mencapai rata-rata dan dari pencapaian kinerja output keseluruhan program dan kegiatan rata-rata 90,00% ke atas namun demikian kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan masih memerlukan peningkatan;
2. Apabila dibandingkan antara pencapaian kinerja output dengan realisasi anggaran, maka dari aspek efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar telah cukup efisien;
3. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yaitu IKLH belum tercapai target kinerjanya
4. Dari 5 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, 1 IKU tercapai target kinerjanya, yaitu Indeks Kualitas Udara, dan 4 IKU tidak tercapai target kinerjanya yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas



Tutupan Lahan, Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan, serta Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah.

4.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan waktu yang ditentukan perlu dipertimbangkan kemampuan aparatur dan keterkaitan kegiatan tersebut dengan kegiatan pada Instansi lain, selain itu pemantauan dan evaluasi tetap harus dilaksanakan secara berkala;
2. Untuk meningkatkan kualitas produk kegiatan perlu meningkatkan motivasi kerja personal maupun mengikuti pelatihan, sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dan bintek teknis lainnya untuk peningkatan SDM Aparatur;
3. Tersedianya basis data lingkungan hidup yang akurat dan lengkap yang digunakan untuk menentukan besaran target indikator kinerja utama dan indikator kinerja program/kegiatan. Target yang tepat akan menjadikan rencana kerja terarah dan terukur;
4. Mengoptimalkan fungsi laboratorium lingkungan hidup, hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan bisa dijadikan salah satu sumber pendapatan asli daerah di bidang retribusi;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan melalui pembinaan dan pembentukan serta pendampingan kelompok masyarakat peduli lingkungan dan serta pegiat-pegiat lingkungan serta melibatkan pihak swasta untuk menyalurkan CSR nya dalam kegiatan berbasis lingkungan seperti bank pohon, bank sampah, getar kasih, sekolah adiwiyata, desa berseri, desa proklamasi dan lain sebagainya.



Akhirnya dengan harapan laporan ini bisa diterima dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait serta menjadi bahan masukan untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang, sehingga visi-misi Bupati/Wakil Bupati segera dapat terwujud.

Blitar, 19 Februari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Blitar



ACHMAD CHOLIK, S.Sos, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700725 199003 1 003

LAMPIRAN I

MATRIKS PERUBAHAN RENSTRA 2021-2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR
Jl. Manukwari No. 12B ☎ (0342) 801590 Satriyan
Kanigoro-Blitar

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
											2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Peningkatan kualitas lingkungan hidup							Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		64.35	64.90	65.45	66.00	66.54	67.09	67.64										
	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan						Indeks Kualitas Air		55	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6										
							Indeks Kualitas Udara		86.6	86.7	86.8	86.91	87.01	87.11	87.21										
							Indeks Kualitas Tutupan Lahan		39.27	41.41	43.55	45.69	47.83	49.97	52.11										
		2	1	0			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	%	data awal : 6	5%	186,765,500	5%	235,000,000	5%	250,000,000	5%	600,000,000	5%	250,000,000	25%	300,000,000	Bidang Taling	Kab. Blitar		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
											2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							disusun																		
		2	1	0	2		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen KLHS yang disusun	%	data awal : 4	6%	186,765,500	6%	235,000,000	6%	250,000,000	6%	600,000,000	6%	250,000,000	6%	300,000,000	Bidang Taling	Kab. Blitar	
		2	1	0	2		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup	%	dokumen lingkungan : 3.426	10%	324,175,000	10%	3,185,000,000	10%	1,793,942,209	10%	1,814,147,314	10%	1,819,220,418	10%	1,830,970,401	Bidang Taling, Bidang P3KL, Bidang Peningkatan Kapasitas LH	Titik lokasi pengendalian pencemaran di Kab. Blitar	
		2	1	0	2		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Persentase obyek yang dapat dilakukan pencegahan pencemaran dan/atau	%	NA	5%	184,484,500	5%	650,000,000	5%	300,000,000	5%	350,000,000	5%	350,000,000	5%	350,000,000	Bidang Taling	Titik lokasi pencegahan pencemaran di Kab. Blitar	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
											2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Kerusakan Lingkungan Hidup																		
		2	1	0	2		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	%	NA	5%	88,173,500	5%	285,000,000	5%	200,000,000	5%	250,000,000	5%	250,000,000	5%	250,000,000	Bidang Taling	Titik lokasi penanganan pencemaran di Kab. Blitar		
		2	1	0	2		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	%	NA	15	51,517,000	15	2,250,000,000	15	1,194,942,209	15	1,214,147,314	15	1,219,220,418	15	1,230,970,401	Bidang P3KL, Bidang Peningkatan Kapasitas LH	Sungai dan Lahan Kritisdi Kab. Blitar		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		21014		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan	%	NA	2	11,698,680,000	4	12,000,000,000	8	4,760,678,708	12	5,209,457,024	16	5,222,912,283	20	5,254,076,461	Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Taman Kota dan RTH di Kab. Blitar	
		21021		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Luas penambahan ruang terbuka hijau	m2	NA	1000	11,698,680,000	1000	12,000,000,000	1000	4,760,678,708	1000	5,209,457,024	1000	5,222,912,283	1000	5,254,076,461	Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Taman Kota dan RTH di Kab. Blitar	
		21015		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	%	NA	-	-	-	-	1	2,598,294,200	2	2,846,608,428	3	2,667,014,295	4	2,784,014,500	Bidang Taling	Usaha / Kegiatan di Kab. Blitar	
		21011		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limabah B3	Jumlah Limbah B3 yang tertangani	ton	NA	-	-	-	-	24	2,598,294,200	48	2,846,608,428	72	2,667,014,295	96	2,784,014,500	Bidang Taling	Usaha / Kegiatan di Kab. Blitar	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2	1	0			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	%	46	60	245,221,000	65	250,000	70	265,000	75	275,000	80	300,000	85	300,000	Bidang Taling, Bidang P3KL	Usaha / Kegiatan di Kab. Blitar
		2	1	0	2		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kegiatan/ usaha yang memenuhi syarat pengelolaan limbah baik	%	46	60	245,221,000	65	250,000	70	265,000	75	275,000	80	300,000	85	300,000	Bidang Taling, Bidang P3KL	Usaha / Kegiatan di Kab. Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							2021		2022		2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2	1	0		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan	%	Jumlah gerakan : 10	10	1,341,751,000	10	321,000,000	10	500,000,000	10	520,000,000	10	525,000,000	10	525,000,000	Bidang Peningkatan Kapasitas LH	Komunitas dan Lembaga Peduli Lingkungan di Kab. Blitar
		2	1	0	2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang meningkatkan pengetahuannya	Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang meningkatkan pengetahuannya	%	NA	60	1,341,751,000	60	321,000,000	60	500,000,000	60	520,000,000	60	525,000,000	60	525,000,000	Bidang Peningkatan Kapasitas LH	Komunitas dan Lembaga Peduli Lingkungan di Kab. Blitar
		2	1	0		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	%	NA	-	-	5	100,000,000	5	300,000,000	5	350,000,000	5	450,000,000	5	500,000,000	Bidang Tata Lingkungan	OPD, Desa, Sekolah, Usaha/Kegiatan di Kab. Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2	1	0	2		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	jenis	NA	-	-	5	100,000,000	5	300,000,000	5	350,000,000	5	450,000,000	5	500,000,000	Bidang Tata Lingkungan	OPD, Desa, Sekolah, Usaha/ Kegiatan di Kab. Blitar
		2	1	1	0		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	%	NA	50	20,781,000	55	25,000,000	60	45,000,000	65	50,000,000	70	50,000,000	75	60,000,000	Bidang P3KL	Usaha, Kegiatan, dan Masyarakat di Kab. Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2	1	1	2		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100	100	20,781,000	100	25,000,000	100	45,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	60,000,000	Bidang P3KL	Usaha, Kegiatan, dan Masyarakat di Kab. Blitar
	Meningkatnya pengelolaan kebersihan							Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	%	77.16	79		80		81		82		83		84			
		2	1	1			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola	%	77.16	79	4,686,919,100	80.0	4,224,644,650	81	4,500,000,000	82.0	4,650,000,000	83.0	4,700,000,000	84.0	4,750,000,000	Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Masyarakat, TPA, TPS di Kab. Blitar
		2	1	1	2		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase sampah yang dapat ditangani	%	36.65	37	4,686,919,100	37.5	4,224,644,650	38	4,500,000,000	38.5	4,650,000,000	39	4,700,000,000	40	4,750,000,000	Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan	Masyarakat, TPA, TPS di Kab. Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	Nilai	A	80,1 (A)		80,2 (A)		80,3 (A)		80,4 (A)		80,5 (A)		80,6 (A)			
		2	1	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata tingkat capaian kinerja keg. pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	5,127,975,259	100	4,841,222,088	100	5,142,039,388	100	5,955,048,019	100	5,970,429,031	100	6,006,053,506	Sekretariat	DLH Kab. Blitar
								Laju pertumbuhan retribusi daerah	%	NA	10		10		10		10		10		10			
		2	1	0	2		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	dokumen	5	5	63,704,500	4	14,500,000	4	18,500,000	4	18,500,000	4	18,500,000	4	18,500,000	Sekretariat	DLH Kab. Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2	1	0	2		Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	laporan	16	16	4,443,268,013	16	4,222,236,718	16	4,441,154,018	16	4,704,162,649	16	4,704,543,661	16	4,705,168,136	Sekretariat	DLH Kab. Blitar
		2	1	0	2		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	41	41	-	41	-	41	-	41	550,000,000	41	550,000,000	41	550,000,000	Sekretariat	DLH Kab. Blitar
		2	1	0	2		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	bulan	12	12	108,094,900	12	119,800,000	12	149,800,000	12	149,800,000	12	154,800,000	12	174,800,000	Sekretariat	DLH Kab. Blitar
		2	1	0	2		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jenis	4	4	43,156,700	4	37,000,000	4	64,980,000	4	64,980,000	4	64,980,000	4	79,980,000	Sekretariat	DLH Kab. Blitar

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										2021		2022		2023		2024		2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2	1	0	2		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	342,332,146	12	352,685,370	12	352,685,370	12	352,685,370	12	352,685,370	12	352,685,370	Sekretariat	DLH Kab. Blitar
		2	1	0	2		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12	127,419,000	12	95,000,000	12	114,920,000	12	114,920,000	12	124,920,000	12	124,920,000	Sekretariat	DLH Kab. Blitar
Jumlah											23,632,267,859		25,181,866,738		20,005,954,505		22,270,260,785		21,954,576,027		22,310,114,868			

LAMPIRAN II

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR
Jl. Manukwari No. 12B ☎ (0342) 801590 Satriyan
Kanigoro-Blitar



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHMAD CHOLIK, S.Sos, M.M

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. JUMADI, M.MT

Jabatan : Pjs Bupati Blitar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Blitar, 31 Oktober 2024

Pihak Pertama,



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BITAR**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan	- Indeks Kualitas Air	55,40
		- Indeks Kualitas Udara	87,01
		- Indeks Kualitas Tutupan lahan	47,83
2.	Meningkatnya pengelolaan kebersihan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	82
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	80,4 (A)

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 9.037.044.487,00	DAU
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 300.000.000,00	DAU
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 9.881.966.273,00	DAU
4.	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 867.552.900,00	DAU
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rp. 24.000.000,00	DAU
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 78.430.615,00	DAU
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 1.801.627.868,00	DAU
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 12.678.932,00	DAU
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 25.250.000,00	DAU

Program	Anggaran	Keterangan
10. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 2.703.439.085,00	DAU



LAMPIRAN III

REALISASI ANGGARAN & KINERJA KEGIATAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR
Jl. Manukwari No. 12B ☎ (0342) 801590 Satriyan
Kanigoro-Blitar

Lampiran III

Ringkasan Realisasi Anggaran dan Kinerja Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2024

NO.	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.037.044.487	8.741.370.752	96,73	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.146.294	1.510.180	36,42	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	4 dokumen	4 dokumen
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.914.084	689.720	36,03	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.232.210	820.460	36,76	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.060.020.958	3.844.723.178	94,70	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	16 laporan	16 laporan
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.033.526.400	3.821.265.838	84,74	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	40 orang	34 orang
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.720.000	21.720.000	100,00	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan	12 laporan
5.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.774.558	1.737.340	36,96	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	4 laporan	4 laporan
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.000.000	119.750.000	99,79	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40 orang	34 orang
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.000.000	119.750.000	99,79	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	40 orang	34 orang
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	390.942.988	390.069.648	99,78	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.155.953	2.153.430	99,88	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.801.944	68.798.216	99,99	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.560.514	36.559.900	100,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.360.000	90,67	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.924.577	281.198.102	99,74	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan

NO.	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.479.396	7.400.000	98,94	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 jenis	1 jenis
12.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.479.396	7.400.000	98,94	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	1 unit
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.047.353.092	3.034.267.122	99,57	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.663.125	16.660.000	99,98	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.655.282	106.902.016	89,34	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan
15.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.476.795	12.156.381	97,43	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.898.557.890	2.898.548.725	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.407.101.759	1.343.650.624	95,49	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.407.101.759	1.343.650.624	95,49	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 unit	64 unit
B.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	300.000.000	299.999.995	100,00	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	5%	5%
VIII.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	300.000.000	299.999.995	100,00	Persentase dokumen KLHS yang disusun	6%	6%
18.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	300.000.000	299.999.995	100,00	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen
C.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.881.966.273	4.402.003.425	44,55	Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup	10%	10%
IX.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	174.173.408	170.887.351	98,11	Persentase obyek yang dapat dilakukan pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5%	5%
19.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	95.000.000	93.473.260	98,39	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	35 dokumen	40 dokumen
20.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	16.099.941	14.877.406	92,41	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen
21.	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	63.073.467	62.536.658	99,15	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
X.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	70.325.115	70.097.115	99,68	Persentase obyek yang	5%	5%

NO.	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI
	<i>Hidup Kabupaten/Kota</i>				diberikan informasi peringatan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
22.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	70.325.115	70.097.115	99,68	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	50 laporan	101 laporan
<i>XI</i>	<i>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	<i>9.637.467.750</i>	<i>4.161.018.959</i>	<i>43,18</i>	Persentase obyek yang mendapatkan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	15%	15%
23.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	788.353.380	775.677.453	98,39	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/ atau Provinsi dan/ atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	3 dokumen	8 dokumen
24.	Pelaksanaan Rehabilitasi	8.849.114.370	3.385.341.506	38,26	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	10 Ha	11,81 Ha
<i>D.</i>	<i>Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	<i>867.552.900</i>	<i>784.354.079</i>	<i>90,41</i>	Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan	0,05%	0,05%
<i>XII.</i>	<i>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	<i>867.552.900</i>	<i>784.354.079</i>	<i>90,41</i>	Luas penambahan ruang terbuka hijau	0	0
25.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	867.552.900	784.354.079	90,41	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	7,2 Ha	7,2 Ha
<i>E</i>	<i>Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</i>	<i>24.000.000</i>	<i>23.999.960</i>	<i>100,00</i>	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	2%	2%
<i>XIII</i>	<i>Penyimpanan sementara Limbah B3</i>	<i>24.000.000</i>	<i>23.999.960</i>	<i>100,00</i>	Jumlah Limbah B3 yang tertangani	48 ton	70 ton
<i>26</i>	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	24.000.000	23.999.960	100,00	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 dokumen	25 dokumen
<i>F.</i>	<i>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	<i>78.430.615</i>	<i>76.592.345</i>	<i>97,66</i>	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh 2Pemerintah Daerah Kab	75%	71,57%
<i>XIV.</i>	<i>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>78.430.615</i>	<i>76.592.345</i>	<i>97,66</i>	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	75%	71,57%
27.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	17.000.000	16.986.064	99,92	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan Teknis,	250 rekom	363 rekom

NO.	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI
					Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		
28.	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	61.430.000	59.606.281	97,03	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100 usaha	102 usaha
G.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.801.627.868	1.741.813.880	96,68	Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan	10%	10%
XI.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.801.627.868	1.741.813.880	96,68	Persentase SDM Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat pengetahuannya	60%	60%
29.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	787.972.170	767.444.930	97,39	Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup	4 gerakan	4 gerakan
30	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	462.022.228	457.741.800	99,07	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	2400 KK	3209 KK
31.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	551.633.470	516.627.150	93,65	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	42 lembaga	42 lembaga
H.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	12.678.932	12.637.018	99,67	Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	5%	1%
XVI.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.678.932	12.637.018	99,67	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	5 jenis	1 jenis
32.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	12.678.932	12.637.018	99,67	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 entitas	1 entitas
I.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.250.000	24.674.000	97,72	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	65%	100%
XVII.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	25.250.000	24.674.000	97,72	Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan	100%	100%
33.	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	25.250.000	24.674.000	97,72	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangan	20 pengaduan	10 pengaduan
J.	Program Pengelolaan Persampahan	2.703.439.085	2.677.052.418	99,02	Persentase sampah yang dikelola	81%	58,50%

NO.	PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI BIAYA			KELUARAN (OUTPUT)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALISASI
XVIII.	Pengelolaan Sampah	2.703.439.085	2.677.052.418	99,02	Persentase sampah yang dapat ditangani	38%	53,61%
34.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	300.000.000	299.933.658	99,98	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Berbasis	195 kelompok	165 kelompok
35.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.188.257.545	2.164.569.706	98,92	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	105 unit	139 unit
36.	Penanganan sampah melalui pengangkutan	16.117.096	16.054.500	99,61	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	60.500 ton	76.293,03 ton
37.	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	64.571.764	63.405.064	98,19	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	75,77%	50,12%
38.	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	59.001.755	58.598.990	99,32	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	10 ton	5.310,53 ton
39.	Pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	75.490.925	74.490.500	98,67	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	100 ton	76.293,03 ton
TOTAL		24.731.990.160	18.784.497.872,35	75,95			

LAMPIRAN IV

FOTO PENDUKUNG PELAKSANAAN

KEGIATAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2024



LAMPIRAN IV**FOTO PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. BLITAR TAHUN 2024****Tabel L.4.1
Data Prestasi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT
1	Pemerintah Kabupaten Blitar	Penghargaan pembinaan ProKlim	Nasional
2	Dusun Tegalrejo Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo	Penghargaan ProKlim Lestari	Nasional
3	Dusun Dawung Ds. Olak Alen Kec. Selorejo	Penghargaan ProKlim Utama	Nasional
4	Dusun Pehlumbu Ds. Pagergunung Kec. Kesamben	Penghargaan ProKlim Utama	Nasional
5	Dusun Jamberejo Ds. Jambepawon Kec. Doko	Penghargaan ProKlim Utama	Nasional
6	Dusun Tulungrejo Ds. Resapombo Kec. Doko	Penghargaan ProKlim Utama	Nasional
7	Dusun Donomulyo Ds. Slumbung Kec. Gandusari	Penghargaan ProKlim Utama	Nasional
8	Dusun Tulungrejo Ds. Tulungrejo Kec. Gandusari	Penghargaan ProKlim Utama	Nasional
9	SMPN 1 Nglegok	Penghargaan Adiwiyata Mandiri	Nasional
10	SMPN 1 Garum	Penghargaan Adiwiyata Mandiri	Nasional
11	MAN 1 Blitar	Penghargaan Adiwiyata Mandiri	Nasional
12	MIN 1 Blitar	Penghargaan Adiwiyata Nasional	Nasional
13	SMPN 1 Kesamben	Penghargaan Adiwiyata Nasional	Nasional
14	SMPN 1 Talun	Penghargaan Adiwiyata Nasional	Nasional
15	Ds. Sumberagung Kec. Selorejo	Desa / Kelurahan BERSERI Mandiri	Provinsi
16	Ds. Pakisrejo Kec. Srengat	Desa / Kelurahan BERSERI Madya	Provinsi
17	Ds. Bendosari Kec. Sanankulon	Desa / Kelurahan BERSERI Madya	Provinsi

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT
18	Ds. Tuliskriyo Kec. Sanankulon	Desa / Kelurahan BERSERI Madya	Provinsi
19	Ds. Bacem Kec. Sutojayan	Desa / Kelurahan BERSERI Madya	Provinsi
20	MI Plus Al Mahmud	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Provinsi
21	MIN 3 Blitar	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Provinsi
22	MIN 9 Blitar	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Provinsi
23	MIN 11 Blitar	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Provinsi
24	UPT SDN Bumirejo 03	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Provinsi
25	UPT SDN Pohgajih 01	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Provinsi
26	UPT SDN Srengat 03	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Provinsi
27	UPT SDN Sukorejo 01	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Provinsi
28	UPT SDN Sumberdadi	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Provinsi
29	MTSN 5 Blitar	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Provinsi
30	UPT SMPN 1 Udanawu	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Provinsi
31	UPT SMPN 2 Gandusari	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Provinsi
32	UPT SMPN 3 Wlingi	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Provinsi
33	MAN 3 Blitar	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Provinsi
34	SMAN 1 Kademangan	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Provinsi



Gambar L.4.1 Penerimaan Penghargaan Pembinaan ProKlim Tahun 2024



Gambar L.4.2 Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2024

DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLITAR

Nama Kegiatan : Verifikasi Lapangan Permohonan OSS RBA
Tanggal Pelaksanaan : 7 Agustus 2024
Tempat : Jasa Sedot WC Nugraha Green and Clean Kecamatan Kanigoro



Nama Kegiatan : Verifikasi dan Asistensi Rincian Teknis TPS LB3
Tanggal Pelaksanaan : 24 Juli 2024
Tempat : CV Chandra Dani Putra Kecamatan Talun



Nama Kegiatan : Pengawasan RS Aulia Sutojayan
Tanggal Pelaksanaan : 12 September 2024
Tempat : Kecamatan Sutojayan



Nama Kegiatan : Uji Kualitas Air di Sungai Rejoso
Tanggal Pelaksanaan : 17 September 2024
Tempat : Kecamatan Binangun



Nama Kegiatan : Koordinasi terkait Gerakan Terpadu Kali Bersih di Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
Tanggal Pelaksanaan : 3 Maret 2024
Tempat : Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar



Nama Kegiatan : Pembinaan Desa / Kelurahan BERSERI
Tanggal Pelaksanaan : 17 Januari 2024
Tempat : Desa Besuki Kecamatan Udanawu



Nama Kegiatan : Pembinaan Sekolah Adiwiyata
Tanggal Pelaksanaan : 22 Mei 2024
Tempat : MIN 11 Blitar



Nama Kegiatan : Launching Balitaron (Bayi Lahir Keluarga Tanam dan Rawat Pohon)
Tanggal Pelaksanaan : 3 Juli 2024
Tempat : RTH Kanigoro



Nama Kegiatan : Deklarasi Nagji Tani dan Penanaman
Tanggal Pelaksanaan : 29 Januari 2024
Tempat : Desa Karangrejo Kecamatan Garum



Nama Kegiatan : Peringatan Hari Lingkungan Hidup
Tanggal Pelaksanaan : 3 Juli 2024
Tempat : RTH Kanigoro



Nama Kegiatan : World Clean Up Day 2024
Tanggal Pelaksanaan : 20 September 2024
Tempat : Kecamatan Wlingi



Nama Kegiatan : Rantingsasi Pohon Tepi Jalan
Tanggal Pelaksanaan : 25 September 2024
Tempat : Kecamatan Kanigoro



Nama Kegiatan : Giat Bersih Sungai
Tanggal Pelaksanaan : 8 Oktober 2024
Tempat : Kecamatan Wlingi

